

# ANALISIS PERCERAIAN DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TEGAH

Wali Mahendra Gandhi

NPP. 30.0729

*Asdaf Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: walimahendra@mail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Imelda Hutasoit, M.Kes., MA

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** A high number of divorces in an area will cause various problems for the community and local government of Wonogiri Regency. The impact of divorce will affect local governments in terms of providing protection to people affected by divorce and realizing orderly population administration for those who carry out the divorce. **Purpose:** this study aims to analyze divorce which includes a description of the divorce that occurred, the efforts of the Department of Population and Civil Registration in realizing orderly population administration for those who carry out the divorce, as well as the efforts of the Office of Population Control and Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection in Wonogiri Regency in protection against women and children who are victims of divorce. **Method:** This study used a qualitative research method with an inductive approach. Researchers collected data by conducting interviews with various parties related to problems in research, documentation, and observation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that one of the causes of divorce in Wonogiri Regency is early marriage. **Conclusion:** the phenomenon of early marriage that occurred in Wonogiri Regency was also one of the factors causing divorce, the Population and Civil Registration Service made the innovation "SIAP ONLINE", as well as the formation of a Women and Children Protection Officers Unit and various other efforts by the Control Service Population and family planning and women's empowerment and child protection.

**Keywords:** Divorce, Service Attempts, Early Marriage

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Perceraian dengan jumlah yang tinggi disuatu daerah akan menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak perceraian dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi pihak yang melakukan perceraian. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian yang meliputi gambaran perceraian yang terjadi, upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi pihak yang melakukan perceraian, serta upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam

perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perceraian.. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada bergai pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, dokumentasi , dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu salah satu penyebab perceraian Di Kabupaten Wonogiri adalah pernikahan dini. **Kesimpulan:** adanya fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonogiri juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat inovasi “SIAP ONLINE”, serta pembentukan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) dan berbagai upaya lain oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

**Kata kunci:** Perceraian, Upaya Dinas, Pernikahan Dini

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rendahnya Di Indonesia, kasus perceraian pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data dari Badan Peradilan Agama, masih sangat banyak kasus perceraian yang diproses oleh Pengadilan Agama. Angka perceraian ini mengalami peningkatan sebanyak 54% jika dibandingkan dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu dari 291.677 kasus meningkat menjadi 447.743 kasus. Cerai gugat yang dilakukan oleh istri di Indonesia lebih mendominasi kasus perceraian di Indonesia, menurut BPS jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743, dengan rincian sebanyak 110.400 cerai talak dan sebanyak 337.343 cerai gugat.

Perceraian akan menimbulkan dampak kepada berbagai pihak. Selain berdampak bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkungan sosial, perceraian memberikan dampak bagi status kependudukan dari seseorang. Perubahan data kependudukan pasti terjadi ketika orang telah bercerai. Data kependudukan yang telah di *update* sangat berpengaruh untuk kepentingan pribadi. Seseorang yang bercerai secara otomatis akan merubah status perkawinannya pada KTP-el dan Kartu Keluarga. Selain berpengaruh untuk kepentingan pribadi, *Update* data kependudukan juga berguna bagi pemerintah dalam melakukan pemetaan penduduk kedalam beberapa golongan. Kewajiban untuk melaporkan perceraian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 menjelaskan kewajiban penduduk dalam melaporkan seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Di Kabupaten Wonogiri, dari tahun ketahun jumlah perceraian selalu diatas 1000 kasus, pada kurun waktu 4 tahun terakhir tingkat perceraian tertinggi berada ditahun 2019 sebanyak 1788 kasus perceraian dan jumlah perceraian terkecil terdapat ditahun 2021 sebanyak 1288 kasus perceraian. Tingginya perceraian di Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk mengambil keputusan untuk bercerai.

Ketahanan keluarga yang ada di Kabupaten Wonogiri juga erat kaitanya dengan perceraian yang terjadi. Perceraian akan mengakibatkan dampak negative bagi kehidupan keluarga di Kabupaten Wonogiri. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi, maka perubahan status perkawinan pihak yang bercerai juga mengalami perceraian, hal tersebut juga menjadi masalah tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk terus melakukan upaya

dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Wonogiri. Selain itu, adanya korban yang terkena dampak dari perceraian juga menjadi kewajiban bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (PPKB dan P3A) dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perceraian.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri terus mengalami peningkatan jumlah dari tahun ketahun, dengan total lebih dari 1000 kasus setiap tahunnya. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi akan menimbulkan berbagai masalah baik bagi keluarga maupun pemerintah daerah. Dalam lingkungan keluarga tentu akan mempengaruhi kehidupan suami istri dan anak-anak pasangan tersebut, bahkan akan menimbulkan berbagai masalah lainnya yang sangat merugikan secara psikologi, ekonomi, fisik, dan lain-lain. Penyebab dari perceraian ini harus diketahui dengan jelas sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan keadaan keluarga di Kabupaten Wonogiri yang mampu mendorong pasangan suami istri untuk mengambil keputusan untuk bercerai, Jika melihat dalam lingkup pemerintahan, tentunya perceraian akan menimbulkan perubahan data kependudukan karena status perkawinan yang berubah, maka dari itu tingkat kevalidan data kependudukan juga dipengaruhi dari kesadaran masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam mengurus serta memperbarui data kependudukan mereka, namun kesadaran tersebut masih kurang dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya mengurus data kependudukan. Selain berdampak secara administrative, dampak lain berupa psikologi, fisik, dan ekonomi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui instansi terkait, upaya-upaya yang dilakukan harus tepat sasaran mengingat jumlah perceraian di Kabupaten Wonogiri meningkat. Terkhusus bagi para perempuan dan anak yang menjadi korban yang terkena dampak dari adanya perceraian dalam keluarga mereka. Ketidaktahuan masyarakat untuk mengadu kepada instansi terkait akan mempersulit pemerintah daerah dalam menangani korban.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks perceraian maupun berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas. Penelitian Nibras yang berjudul *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia (Nibras 2021)*, menemukan bahwa Di Indonesia, alasan perceraian sepuluh tahun terakhir menjadi semakin beragam. Alasan perceraian berasal dari lebih dari satu sektor. Banyak faktor yang akhirnya memperburuk situasi keluarga hingga pasangan itu akhirnya memutuskan untuk bercerai. Penelitian Sri Devi yang berjudul *Dampak Perceraian Di Bngkan Enkerang (Sri Devi 2019)*, menemukan bahwa Perceraian Di Dusun Bangkan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terjadi begitu saja dan bahkan sebagian masyarakat yang bercerai jarang yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Enrekang. Dan sebagian masyarakatnya baru mengurus surat cerai ketika akan melangsungkan pernikahan lagi dengan suami barunya. Dampak Perceraian Di Dusun bangkan Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yaitu adanya perasaan lega telah bercerai, ada usaha menyesuaikan diri, dan anak menjadi dekat bapak atau ibu nya saja. Penelitian Bella yang berjudul *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kota*

*Tangerang Selatan (Bella 2022)*, Menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan. Dalam pelaksanaannya, ada hambatan berupa kurangnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia baik dari petugas maupun narasumber sosialisasi. Penelitian oleh Ardhia yang berjudul *Implementasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Dengan Sistem Online Sebagai Upaya Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak (Ardhia 2021)*, Menemukan bahwa Dikarenakan kondisi pandemic yang terjadi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak melakukan pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan secara online melalui website. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut berupa ketidak tahuan masyarakat dalam mengakses website tersebut dan adanya jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah sehingga masyarakat wilayah tersebut tidak dapat mengakses website. Penelitian Rizqi yang berjudul *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian (Rizqi 2017)*, menemukan bahwa pentingnya pemahaman tentang ketahanan keluarga di masyarakat, sehingga setiap pasangan suami istri memahami konsep dan tujuan pernikahan serta mempererat ikatan ekonomi dan sosial keluarga untuk menurunkan angka perceraian.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap fenomena perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri dengan mencari tahu penyebab perceraian Di Kabupaten Wonogiri, dampak dari perceraian terhadap berbagai pihak yang dirugikan atas keputusan perceraian yang diambil pasangan suami istri. Selain itu penelitian ini juga berfokus terhadap upaya yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan dampak perceraian yang dirasakan oleh masyarakat meliputi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi pihak yang melakukan perceraian serta upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (PPKB dan P3A) dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perceraian di Kabupaten Wonogiri. Serta mencari tahu kendala yang menghambat proses jalannya upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data yang mendalam dan spesifik, metode ini mengidentifikasi dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam penelitian. Dan menganalisis data dengan menggabungkan, serta mengorganisasikan secara sistematis sesuai dengan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell (2018).

Penulis mengumpulkan data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, Kepala

Bidangng PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang PPA Kabupaten Wonogiri, Kepala Subbagian Pemberdayaan Perempuan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak perceraian. Serta menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang akan dibahas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri dengan menguraikan masalah tersebut menjadi 3 subbab yang terdiri dari kondisi perceraian Di Kabupaten Wonogiri, meliputi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi pihak yang melakukan perceraian, serta upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (PPKB dan P3A) dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perceraian di Kabupaten Wonogiri Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Kondisi Perceraian Di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kondisi perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri menemukan bahwa perceraian yang terjadi dikarenakan beberapa faktor utama yaitu masalah komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa factor diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri. Jika melihat Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu penyebab tingginya perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Wonogiri terdapat 10 kasus pada tahun 2022 sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

<b>Jenis Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
<b>Seksual</b>	3
<b>Psikis</b>	1
<b>KDRT</b>	10
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

*Sumber: Lakip 2022 DPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri*

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa salah satu penyebab perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri adalah adanya pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya dianggap belum sesuai dengan peraturan. Batas usia minimal dilakukanya perkawinan adalah pada usia 19 tahun, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas usia tersebut dianggap telah matang jiwa raganya untuk dapat menjalankan perkawinan agar mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tanpa berakhir dalam perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas dan sehat. Di Kabupaten Wonogiri, pada bulan Juli sampai Desember tahun 2022 terdapat sebanyak 77 kasus pernikahan dini, dimana 21 anak diantaranya berada dalam kondisi hamil. Berikut ini adalah data konseling pengantin anak yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri :

Tabel 2.

No	Kecamatan	Jumlah	Pendidikan			
			Belum Tamat Sekolah	SD	SMP	SMA/SMK
1	Wonogiri	5		4		1
2	Selogiri	2				2
3	Wuryantoro	2			2	
4	Manyaran	3			3	
5	Eromoko	2		2		
6	Pracimantoro					
7	Paranggupito	2			2	
8	Giriwoyo	4			1	3
9	Giritontro	2			1	1
10	Batuwarno	3		1	1	1
11	Girimarto	2			1	1
12	Tirtomoyo	3	1	1	1	
13	Baturetno	7		2	4	1
14	Nguntoronadi	1			1	
15	Ngadirojo	3			2	1
16	Sidoarjo	5			4	1
17	Jatisrono	2			2	
18	Jatiroto	7		2	4	1
19	Jatipurno	3		1	2	
20	Puhpelem	1			1	
21	Bulukerto	5			4	1
22	Slogohimo	1			1	
23	Purwantoro					
24	Karangtengah	12			11	1
25	Kismantoro					
<b>JUMLAH</b>		<b>77</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>17</b>

Sumber : Lakip 2022 DPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

### 3.2. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wonogiri telah melakukan upaya terkait dengan mewujudkan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri yang melakukan perceraian. Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat akan mengakibatkan perubahan status pada dokumen kependudukan yang dimiliki yaitu perubahan pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Cerai.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan tertib administrasi bagi masyarakat wonogiri yang bercerai adalah dengan membuat sebuah inovasi bernama "SIAP ONLINE". "SIAP ONLINE" yang memiliki arti Sistem Informasi Administrasi Perceraian Secara Online. Pada sistem ini berbentuk layanan online administrasi

perceraian dari hasil kerjasama antara Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri dengan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Cara kerja layanan ini dengan menyatukan serta mengintegrasikan sistem kerja antara loket layanan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri dengan Loket Layanan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri melalui aplikasi bernama Telunjuk Sakti. Sehingga setelah proses perceraian selesai, berkas permohonan perceraian beberapa digunakan untuk berkas pengurusan dokumen kependudukan. Kemudian hasil dari program pelayanan ini berupa dokumen: Keputusan atau Penetapan Perceraian, Akta Cerai, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan status Cerai Hidup

Dalam pelaksanaan inovasi “SIAP ONLINE”, capaian pada tahun 2021 sebanyak 78 pemohon, namun pada tahun 2022 jumlah pemohon mengalami penurunan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menjelaskan bahwa terdapat alasan yang mendasari penurunan capaian dari inovasi tersebut yaitu ketidaktahuan masyarakat akan adanya inovasi ini dan rasa malas masyarakat dalam mengurus status kependudukan yang berubah meskipun telah direkomendasikan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri biasanya masyarakat sadar akan merubah status kependudukannya ketika mereka ada kepentingan yang memerlukan dokumen tersebut.

### **3.3. Upaya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (PPKB dan P3A)**

Terkait dengan sarana dan prasarana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri memiliki kantor pelayanan yang berguna untuk menerima aduan atau laporan masyarakat. Kemudian dalam hal mobilisasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri memiliki mobil dan motor layanan yang digunakan untuk menjangkau daerah-daerah pelosok di Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri meliputi berbagai hal. Selain menerima laporan atau aduan dari masyarakat secara langsung melainkan juga menerima laporan melalui telepon. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri juga melakukan pelayanan konseling dan memberikan rehabilitasi kepada korban.

Proses rehabilitasi tersebut dibedakan menjadi rehabilitasi kepada perempuan dan rehabilitasi kepada anak-anak. Rehabilitasi kepada perempuan meliputi tahap pemberian berbagai pelatihan yang akan menunjang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi meliputi menjahit, bidang kuliner atau memasak, dan memberi santunan hewan ternak serta santunan berupa barang-barang penunjang kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang tidak banyak karena keterbatasan anggaran. Sedangkan rehabilitasi kepada anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yaitu pihak panti asuhan apabila anak tersebut tidak dapat diasuh oleh orang tuanya dan pihak RSUD Kabupaten Wonogiri guna memberikan pelayanan psikologi kepada korban.

Selain berbagai upaya diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri juga membentuk Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA). Satgas PPA merupakan satuan atau unit yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait kekerasan perempuan dan anak. Berikut adalah tabel jumlah SATGAS PPA yang tersebar di seluruh desa Di Kabupaten Wonogiri :

#### **Tabel 3.**

No	Kecamatan	Satgas		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1	Wonogiri	90	60	150
2	Selogiri	100	10	110
3	Wuryantoro	60	20	80
4	Manyanan	50	20	70
5	Eromoko	130	20	150
6	Pracimantoro	170	10	80
7	Paranggupito	80	-	80
8	Giriwoyo	140	20	160
9	Giritontro	50	20	70
10	Batuwarno	70	10	80
11	Girimarto	120	20	140
12	Tirtomoyo	120	20	140
13	Baturetno	130	-	130
14	Nguntoronadi	90	20	110
15	Ngadirojo	90	20	110
16	Sidoharjo	100	20	120
17	Jatisrono	150	20	170
18	Jatiroto	130	20	150
19	Jatipurno	90	20	110
20	Puhpelem	50	10	60
21	Bulukerto	90	10	100
22	Slogohimo	100	10	110
23	Purwantoro	130	20	150
24	Karangtengah	50	-	50
25	Kismantoro	80	20	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2510</b>	<b>430</b>	<b>2940</b>

Sumber : Lakip 2022 DPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Fenomena perceraian yang terjadi di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh berbagai factor, sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi selama ini disebabkan karena masalah komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sama halnya dengan penelitian oleh *Nibras (2021)*, yang menjelaskan bahwa alasan perceraian sepuluh tahun terakhir alasan perceraian di Indonesia semakin beragam. Dengan alasan yang berasal dari berbagai sektor sehingga akan memperburuk situasi keluarga hingga pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai.

Dampak dari perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri memberikan dampak kepada beberapa pihak yaitu kepada pasangan suami istri, keluarga, dan anak. Namun dalam penelitian ini juga membahas fokus lain yaitu dampak perceraian terhadap tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri yang bercerai karena adanya perubahan status kependudukan. Berbeda halnya dengan penelitian dari *Sri Devi (2019)* yang berfokus terhadap dampak perceraian kepada keluarga dan anak dari pasangan suami istri yang bercerai. selain itu penelitian tersebut juga membahas tentang kurang sadarnya masyarakat akan kepengurusan perceraian secara legal.

Dalam pelaksanaan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri terdapat berbagai upaya salah satunya dibentuknya SATGAS PPA sebagai implementasi dari ketersediaan SDM dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada level terendah yaitu desa atau kelurahan. Berbeda halnya dengan penelitian *Bella (2022)*, yang menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh DPMP3AKB Kota Tangerang terkait dengan perlindungan anak dan keluarga berencana, sedangkan pada penelitian ini juga menjelaskan upaya perlindungan terhadap perempuan terkhusus yang terdampak perceraian.

Dalam pelaksanaan berbagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi pihak yang bercerai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri yang berbentuk inovasi “SIAP ONLINE” yang mana inovasi tersebut merupakan integrasi pelayanan dari kedua instansi dengan tujuan mempermudah pelayanan perubahan data kependudukan bagi pihak yang bercerai. Sama halnya dengan penelitian *Ardhia (2021)* yang juga menjelaskan bahwa inovasi berbasis online dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Namun pada penelitian ini menjelaskan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berfokus pada pelayanan perubahan data akibat perceraian.

Ketahanan keluarga menjadi sangat penting karena pemahaman setiap pasangan dalam membangun rumah tangga sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian menemukan bahwa kemampuan setiap pasangan dalam menjaga kerukunan baik terkait dengan komunikasi, masalah ekonomi, serta menahan ego masing-masing sangat diperlukan agar terhindar dari berbagai masalah lainnya salah satunya KDRT. Sama halnya dengan penelitian *Rizqi (2017)* menemukan bahwa pentingnya pemahaman tentang ketahanan keluarga di masyarakat, sehingga setiap pasangan suami istri memahami konsep dan tujuan pernikahan serta mempererat ikatan ekonomi dan sosial keluarga untuk menurunkan angka perceraian.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor lain yang menjadi salah satu penyebab perceraian Di Kabupaten Wonogiri yaitu adanya pernikahan dini yang marak terjadi. Hal itu menjadikan rumah tangga yang tersebut tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai permasalahan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri salah satunya disebabkan oleh maraknya pernikahan dini yang terjadi. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidaksiapan sebuah rumah tangga dalam menghadapi berbagai masalah-masalah rumah tangga sehingga memicu perceraian. Perceraian juga mempengaruhi tertib administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Wonogiri karena dengan adanya perceraian maka perubahan data kependudukan akan ikut berubah. Maka dari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri yang berbentuk inovasi “SIAP ONLINE”. Sedangkan berbagai upaya dalam melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban perceraian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri terdapat berbagai upaya salah satunya dibentuknya SATGAS PPA sebagai implementasi dari ketersediaan SDM dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada level terendah yaitu desa atau kelurahan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang terbatas. Penelitian juga dilakukan dalam lingkungan instansi pemerintahan dan mewawancarai masyarakat yang melakukan permohonan perceraian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan salah satu penyebab perceraian Di Kabupaten Wonogiri yaitu pernikahan dini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada narasumber serta berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. New Delhi: SAGE Publications India.
- Nibras S. dkk (2021). *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*. Diakses pada 8 September 2022 dari [https://www.researchgate.net/profile/ShintaDoriza/publication/350412927\\_Cerai\\_Gugat\\_Telaah\\_Penyebab\\_Perceraian\\_Pada\\_Keluarga\\_di\\_Indonesia/links/6094a49aa6fdccaebd11ebdc/Cerai-Gugat-Telaah-Penyebab-Perceraian-Pada-Keluarga-di-Indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/ShintaDoriza/publication/350412927_Cerai_Gugat_Telaah_Penyebab_Perceraian_Pada_Keluarga_di_Indonesia/links/6094a49aa6fdccaebd11ebdc/Cerai-Gugat-Telaah-Penyebab-Perceraian-Pada-Keluarga-di-Indonesia.pdf)
- Sri D. (2019). Dampak Perceraian di Bangkan Enrekang. Diakses pada 8 September 2022 dari <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/73>
- Ardhia Regita dkk. (2021). *Implementasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Dengan Sistem Online Sebagai Upaya Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak*. Diakses pada 1 Maret 2021 dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3023102&val=27336&title=IMPLEMENTASI%20PENDAFTARAN%20DOKUMEN%20ADMINISTRASI%20KEPENDUDUKAN%20DENGAN%20SISTEM%20ONLINE%20SEBAGAI%20UPAYA%20TERTIB%20ADMINISTRASI%20DI%20DINAS%20KEPENDUDUKAN%20DAN%20PENCATATAN%20SIPIIL%20KABUPATEN%20DEMAK>
- Bella Oktaviani (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kota Tangerang Selatan*. Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59692>
- Rizqi M. (2017). *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Diakses pada 8 September 2022 dari <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/268/0>
- DPPKB dan P3A (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Diakses pada 12 Januari 2023 dari [https://dinasppkbandanp3a.wonogirikab.go.id/web/page/14/lkkip\\_\(laporan\\_kinerja\\_instansi\\_pemerintah\\_\)](https://dinasppkbandanp3a.wonogirikab.go.id/web/page/14/lkkip_(laporan_kinerja_instansi_pemerintah_))